

Judul : Ekonomi rakyat kudu digairahkan
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Senayan mendorong agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 diarahkan pada sektor kerakyatan.

Bahas RAPBN Di Tahun Politik

Ekonomi Rakyat Kudu Digairahkan

ANGGOTA Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengatakan, penetapan arsitektur kebijakan fiskal 2024 mesti diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini diperlukan, mengingat kebijakan fiskal Pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi yang bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal dan peningkatan produktivitas.

"Untuk mempercepat transformasi ekonomi, diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal dan produktivitas Pemerintah yang meningkat," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Asumsi ekonomi makro yang dirancang Pemerintah, lanjut anggota Fraksi PDIP ini, harus disertai dengan upaya dan ke-

bijakan yang mampu menopang konsumsi rumah tangga.

Program dukungan di Kementerian/Lembaga (K/L) juga harus dapat meningkatkan produktivitas sektoral, menambah nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

Intervensi dari negara mutlak diperlukan, lantaran lebih dari 65 persen *share* Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha saat ini berkaitan dengan kebijakan sektoral di K/L. Antara lain, sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan sebagainya.

"Karena itu, intervensi Pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, tapi juga pada sektor-sektor kerakyatan," jelasnya.

Dia bilang, kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil harus dilakukan melalui mitigasi dan antisipasi tekanan inflasi global ke domestik.

Karena itu, sepatunya kebijakan dan upaya Pemerintah diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan dan iklim investasi yang kondusif.

"Ini dilakukan dengan target capaian terukur, bukan hanya kata-kata dan di atas kertas," jelas Masinton.

Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024, juga hendaknya ditempuh melalui dua strategi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan *stunting*, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

Sedangkan strategi jangka panjang difokuskan mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi dan mendorong ekonomi hijau.

Untuk itu, capaian strategi

jangka pendek dan jangka panjang tersebut, lanjutnya, harus menunjukkan perbaikan dan peningkatan.

"Rakyat semakin mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, pupuk, urusan perizinan, listrik, dan layanan publik lainnya. Serta meningkatnya manfaat pembangunan yang dirasakan rakyat," jelasnya.

Sementara, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikannya, Fraksi Golkar berpesan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang diusulkan Pemerintah pada kisaran 5,3-5,7 persen terbilang realistis. Mengingat, Indonesia salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Namun demikian, pencapaian target tersebut bukan tanpa risiko dan tantangan. Terutama dari faktor-faktor eksternal seperti gejolak harga dan permintaan global terhadap ekspor komodi-

tas unggulan nasional.

"Karena itu, Fraksi Golkar mengharapkan penjelasan dari Pemerintah lebih rinci terkait langkah strategi dan mitigasi risiko dalam realisasi target tersebut," ujarnya.

Dave menuturkan, Fraksi Golkar mengapresiasi optimisme Pemerintah mengusulkan target inflasi 2024 pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga 2024, target tersebut perlu dicermati secara seksama.

Terlebih, pada 2024 akan berlangsung pesta demokrasi dan wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi nasional.

"Dalam hal ini, Fraksi Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari Pemerintah beserta *stakeholders* seperti Bank Indonesia, untuk mencapai target tersebut," harapnya. ■ KAL